

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA¹

THE EFFECT OF REGIONAL LOCAL REVENUE ON FINANCIAL PERFORMANCE OF THE LANGSA CITY GOVERNMENT

Iqlima Azhar, S.E.,M.Si²

Email: iqlimaazhar6@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local revenue on the financial performance of the Langsa City Government. The research was conducted at the Regional Government Financial Management Agency (BPKD) of Langsa City, namely the financial statements of the Langsa City local government from 2011 to 2020. It shows that the regional local Revenue (PAD) variable has a significant value of 0.168 which means it is above 0.05 ($t_{sig} > 0.05$), so it can be concluded that the local revenue variable has no significant effect on the financial performance of local governments.

Keywords: Local Revenue, Financial Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Langsa. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) Kota Langsa yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. menunjukkan bahwa variable pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,168 yang berarti diatas 0,05 ($t_{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan.

¹ Diterima 03 September 2021, direvisi 1 Oktober 2021

² Dosen Universitas Samudra, Langsa, Aceh Timur, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peranan dari pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan yang luas untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Menurut Pelealu (2013), Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan yang disebutkan oleh Uhise (2013) bahwa pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan dan mengelola sumber-sumber keuangan yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dikeluarkan Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang

“Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang No.33 Tahun 2004.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi poin penting tersebut, maka analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kota Langsa merupakan salah satu kabupaten/kota yang terletak di provinsi aceh. Kota Langsa merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Setelah proses pemekaran, maka kota langsa diharapkan mampu mengatur keuangan daerahnya. Secara umum dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, realisasi yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Anggaran Dan Realisasi PAD Kota Langsa Tahun 2011- 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2011	36.310.437.019	21.612.910.030
2012	35.464.721.911	16.666.942.465
2013	64.236.271.011	57.243.381.959
2014	105.021.202.287	114.168.702.058
2015	114.592.994.341	109.116.860.676
2016	133.420.175.265	10.855.975.158
2017	127.325.504.605	13.293.761.532
2018	125.634.683.815	121.361.713.328
2019	958.741.649.670	115.244.246.710
2020	159.592.856.511	126.277.867.970

Sumber: BPKD Kota Langsa

Menurut Siregar (2017:32), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Wulandari, Iryanie (2016), pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam pendapatan asli daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah memegang

peranan penting dalam mengelola keuangan daerahnya, karena melalui PAD tersebut dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. (Harahap, 2018).

Berdasarkan paparan permasalahan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa”**.

B. STUDI PUSTAKA

1) Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggung jawaban. Menurut Fahmi (2012: 2) yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan adalah hasil atau ukuran suatu analisis

yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi tertentu telah melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengertian Kinerja Keuangan menurut Jumingan (2006: 239) merupakan gambaran kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang sudah dicapai sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur sesuai dengan program yang telah ditentukan dan direncanakan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2012: 25). Pendapat lainnya mengatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang ukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro, 2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari

suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah.

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik. Menurut Halim (2007: 24) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja adalah informasi keuangan.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup Kinerja Keuangan. Penggunaan rasio efisiensi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (sumarjo, 2010). Kinerja keuangan dikatakan efisiensi apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin besar.

**Rasio Efisiensi pendapatan asli daerah = Biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD
realisasi penerimaan PAD**

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2007: 96), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2008 :25). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang berlaku di mana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

- 1) Pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010:9). Mardiasmo (2011: 6) berpendapat bahwa "Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah". Menurut Resmi (2011:8) "Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing". Berdasarkan tiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- 2) Retribusi Daerah. Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face*, atau *charging for service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa

tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi.

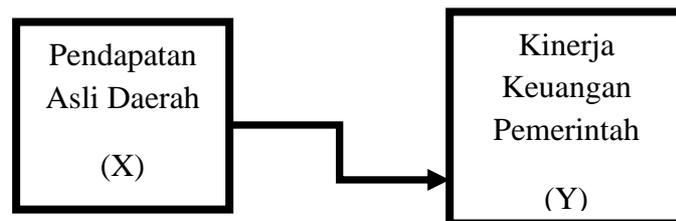
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu indikator pendapatan asli daerah diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya oleh karena itu, PAD memiliki peran yang penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah (Liando, 2017: 5).

3) Kerangka Pemikiran Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan, pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi, Menurut Wulandari, Iryanie (2017 :23), pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam pendapatan asli daerah dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ha: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kota langsa.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu merupakan catatan

atas peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (sugiyono, 2013). Dokumen pada penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa yang terdapat di badan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa.

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan serta laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (nazir, 2013). Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dan artikel.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kota langsa dan Sampel yang diteliti yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kota Langsa tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis parsial satu variabel dependen dengan variabel independen dan melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada pemerintahan Kota Langsa yang diolah dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Spesifikasi persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b1X1 + e$$

Dimana:

- Y : Kinerja Keuangan
- a : Konstanta
- X1 : Pendapatan Asli Daerah
- e : error
- b : Koefisien Regresi

Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) merupakan hasil atau ukuran suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah melaksanakan kegiatannya dengan

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

2. Variabel Bebas (Pendapatam Asli Daerah) adalah penerimaan yang sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pelealu, A.M. Tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh DAK dan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Manado.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Tri Yuni, tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2016. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, berarti daerah tersebut memiliki potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi

pendapatan PAD maka semakin besar pula kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi nya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Phareula Artha Wulandari, Emy Iryanie. Tahun 2016 yang berjudul Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi penerimaan PAD dari Tahun 2007 - 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan PPJU berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin, yang berarti bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin di tuntut untuk mampu meningkatkan PAD melalui pajak daerah yang kontribusinya cukup besar.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri, Sealys Harie, tahun 2020, yang berjudul pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Populasi penelitian ini adalah 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahu 2015-2017, sehingga total populasi adalah 114 pemerintah daerah. Hasil peneitian

ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo, Hendro, tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 125 pemerintah daerah. Data di dapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana dari semua sampel, tingkat rerata efisiensi dari Pemerintah Daerah di Indonesia masih buruk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD}_{t_1} - \text{PAD}_{t_0}}{\text{PAD}_{t_0}}$$

Penggunaan rasio efesiensi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sumarjo, 2010) yaitu,

kinerja keuangan dikatakan efesiensi apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efesiensi apabila rasio yang dihasilkan semakin besar.

Tabel 2
Jumlah PAD Kota Langsa

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2011	36.310.437.019
2012	35.464.721.911
2013	64.236.271.011
2014	105.021.202.287
2015	114.592.994.341
2016	133.420.175.265
2017	127.325.504.605
2018	125.634.683.815
2019	958.741.649.670
2020	159.592.856.511

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	,612	,395	1,551	,172
	PAD	-,175	,112	-1,569	,168

Berikut ini persamaan dari pengujian hipotesis, yaitu:

$$Y = 0,612 - 0,175 X_1 + e$$

Berdasarkan regresi linier berganda, maka dapat diinterpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 0,612 artinya ini menunjukkan nilai kinerja keuangan pemerintah daerah apabila Pendapatan Asli Daerah bernilai tetap.
2. Koefisien Regresi Variabel pendapatan asli daerah sebesar -0,175 artinya setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar satu satuan, maka akan menurunkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,175 satuan.

Pembuktian Hipotesis

Hasil dari Uji Parsial melalui Uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan

asli daerah (PAD) mempunyai nilai signifikan sebesar 0,168 yang berarti diatas 0,05 ($t_{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. yang berarti hipotesis ditolak.

Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka tidak akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah tidak

dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut. Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2011:121) salah satunya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam memberi pelayanan publik, yang mana jika dilihat dari kebijakan yang di ambil oleh Dinas Pendapatan Kota Langsa dalam menetapkan kenaikan BPHTB guna meningkatkan PAD dinilai banyak mengecewakan masyarakat Kota Langsa itu sendiri, sehingga di harapkan pihak pemerintah dapat menggali potensi lain selain pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak PBB dan Bea Perolehan BPHTP. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah Kota Langsa sebagai sampel penelitian dan hanya menggunakan tahun anggaran 2011 - 2020. Penelitian selanjutnya diharapkan

melibatkan lebih banyak sampel pemerintah daerah sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan data yang lebih signifikan.

Saran dan Rekomendasi

- Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan indikator lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas.
- Pemerintah diharapkan bisa lebih inovatif dalam mencari pendapatan untuk daerah dengan mempergunakan Sumber Daya Alam seperti lahan-lahan kosong yang ada di Kota Langsa untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Baldric Siregar, 2017. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Devi, Vivi Sri, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Tranfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang
- Dewi, Fevi Prastika, 2019, Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress di Kota Langsa, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Samudra Langsa, Aceh.
- Harahap, Ardiansyah Putra, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

- dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang. **Jurnal Bisnis Net**. Vo.1, No. 1 Januari 2018.
- Mahmudi, (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Mahsun, (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Pelealu, A.M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. **Jurnal EMBA**. Vo.1, No. 4. Desember 2013, Hal. 11811_11117.
- Phareula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. **E-Jurnal, Universitas Bakrie**, Jakarta. 2-3 Mei 2016.
- Pratiwi, Tri Yuni, 2018, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1012 2016, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Saputri, Sealys Harie, 2020, Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, **Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi**, Vol 9, No 1, 1 - 21
- Sumarjo, Hendro, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Skripsi, Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. **Jurnal EMBA**. Vo.1, No. 4 Desember 2013. Hal. 1677-1686.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).